

## ABSTRAKSI

Banjir sudah menjadi langganan bagi kota Surabaya tiap kali musim penghujan datang. Hal ini kerap mengganggu aktivitas bagi kebanyakan warga kota Surabaya. Banjir yang melanda sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan, diberbagai tempat genangan air yang terjadi hampir setinggi lutut orang dewasa. Bahkan di daerah Wiyung banjir yang terjadi menenggelamkan salah satu sekolah yang ada disitu. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, akan tetapi sampai sekarang hasil dari upaya itu sendiri belum bisa dilihat. Inilah yang kemudian menggugah penulis untuk mengangkat penanganan banjir ini dalam sebuah penelitian.

Penyebab dari banjir di kota Surabaya lebih dikarenakan kurang memadainya sistem pematuan yang ada. Ini mengakibatkan limpasan air hujan tidak sepenuhnya bisa mengalir ke sungai yang berfungsi sebagai saluran primer. Dalam hal ini sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya sudah berupaya untuk menanganinya lewat proyek-proyek rehabilitasi, perawatan maupun pembangunan-pembangunan saluran pematuan di berbagai wilayah kota, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali proyek-proyek yang molor pengerjaannya. Program yang sudah baik dalam tataran rencana akhirnya berantakan ketika diimplementasikan dilapangan, padahal program tersebut sudah banyak memakan biaya dari APBD.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi, dan Disposisi/Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan penanganan banjir.

Untuk menjawab permasalahan penelitian diatas, berdasarkan taraf penjelasannya menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan maksud bukan hanya untuk mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga bertujuan untuk mencari penyebab timbulnya banjir dan mencari hubungan antar gejala-gejala atau faktor-faktor yang muncul dalam fenomena banjir tersebut serta mengapa dan bagaimana hal itu bisa muncul atau terjadi. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara yang berpedoman pada *guiding interview* serta data sekunder berupa hasil dokumentasi dan juga data yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Data diolah dengan melakukan validasi data berupa triangulasi data sehingga data yang disajikan adalah data yang absah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari proses maupun hasil pelaksanaan kebijakan penanganan banjir, sudah berhasil mencapai kemajuan. Faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan atau penyirapangan tersebut teridentifikasi pada lemahnya struktur birokrasi yang ada, dimana tidak terdapat suatu kejelasan dasar hukum dalam implementasi kebijakan penanganan banjir. Disamping itu, kelemahan juga ditemukan pada sumber daya terutama pada sumber dana. Proses penganggaran yang lama dan kurang mencukupinya dana yang tersedia menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan penanganan banjir. Meskipun demikian dalam variabel komunikasi dan disposisi / sikap pelaksana terlihat sudah berjalan dengan baik.